



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Capacity building kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes)

Nuraisyah Nuraisyah^{*}, Dandan Haryono

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Jul 25th, 2022

Revised Oct 10th, 2022

Accepted Oct 31st, 2022

Keyword:

Capacity building
Badan usaha pemerintahan desa
(BUMDes)

ABSTRACT

Kabupaten Sigi adalah salah satu kabuapten yang memiliki BUMDES yang sudah begitu banyak dan sebagai Latar belakang penelitian ini terkait dengan Capacity Buliding Kelembagaan BUMDES dimana ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES. terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti sulitnya membangun motivasi belajar masyarakat karena masyarakat awam belum mengetahuinya. tentang potensi alam, dan kesulitan karyawan dalam menerapkan hasil proses pelatihan mereka di bidang pekerjaannya. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tentang Capacity Building Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sigi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan fenomenologi. Penelitian ini menentukan informan penelitian yang terkait langsung dalam pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh BUMDES. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses identifikasi dan pengorganisasian data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan sumber lainnya. Sehingga, dapat mudah dipahami dan temuan dapat diinformasikan secara cermat kepada khalayak luas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Capacity Building Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sigi diukur dari unsur-unsur kapasitas, seperti pengembangan kelembagaan, *Capacity building* sumber daya manusia dan *capacity building* sistem. yang belum efektif.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Nuraisyah Nuraisyah,
Universitas Tadulako
Email: nuraisyah121270@gmail.com

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa yang disingkat menjadi BUMDES merupakan suatu lembaga/usaha yang dikelola pemerintah dan masyarakat desa yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa (Maryunani, 2008). UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan payung hukum atas BUMDES sebagai pelaku ekonomi yang mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa. Istilah BUMDES muncul melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 72/2005 dan dirincikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 39/2010. BUMDES merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Sebagai bagian dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut memberikan wewenang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Otonomi desa ada sebagai bagian dari otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. “Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat” (Nurul Huda, 2015). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi berkelanjutan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sampai saat ini masih merupakan target utama dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi nasional maupun daerah disamping pembangunan fisik” (Sjafrizal, 2014). Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi lokal desa didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDES diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDES bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDES dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pasal 1 “BUMDES adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Pasal 2 “Pendirian BUMDES dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa.

BUMDES memberanikan diri untuk mengelola potensi desa secara mandiri. Pemahaman mengenai potensi desa secara konseptual dikemukakan oleh (Nyoman, 2018) bahwa “potensi desa secara umum meliputi sumber-sumber alami dan sumber-sumber manusiawi baik yang sudah terwujud maupun yang belum terwujud dan yang dapat diharapkan pemanfaatannya bagi kelangsungan dan perkembangan suatu desa dan masyarakat desanya”. Potensi desa dapat dibagi menjadi dua yaitu potensi fisik alam dan potensi nonfisik/sosial. di Kabupaten Sigi, sektor pertanian dan peternakan merupakan salah satu sektor potensial untuk dikembangkan. BUMDES memanfaatkan kekayaan sumber daya alam. Desa di kabupaten sigi mayoritas sudah memiliki BUMDES dilihat dari data jumlah desa 176, 104 nya sudah memiliki BUMDES

dan tersisa 72 desa yang sedang dalam proses pendirian sehingga besar kemungkinan memiliki peluang kemajuan untuk desa mandiri.

Kehadiran BUMDES di Kabupaten Sigi juga memberikan sumbangan yang berarti dalam meringankan beban Ekonomi masyarakat dengan melalui program binaan, pelatihan dan penyuluhan agar masyarakat mendapatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola usaha. Dalam pengelolaan potensi usaha tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan. Kapasitas secara sederhana diartikan oleh Milen (2006) “sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efisien, efektif dan terus menerus”. Sedangkan kelembagaan secara sederhana diartikan oleh Koentjaraningrat dalam (Haryanto, 2014) “sebagai seperangkat aturan main (*rules of the games*) yang menata serangkaian tindakan berpola untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari masyarakat”. Selanjutnya, kapasitas kelembagaan menurut (Haryanto, 2014) diartikan “sebagai kemampuan sebuah institusi untuk menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia secara optimal dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, *output*, *outcome* dan *impact* sebagaimana yang telah ditentukan”. Sumber-sumber daya tersebut yakni SDM, sistem, struktur, anggaran, dan fasilitas.

Berdasarkan observasi lapangan ditemukan beberapa indikasi masalah/permasalahan bahwa berbagai macam unit usaha di BUMDes di Kabupaten Sigi ditawarkan untuk masyarakat diantaranya adalah pencacahan limbah plastik dan penggemukan ternak hewan sapi dan photo copy dan usaha lainnya. beberapa program tersebut yang dilaksanakan oleh BUMDes belum memberikan dampak yang nyata (signifikan) kepada BUMDes sendiri maupun masyarakat. Dalam pengelolaan BUMDES masih banyak masyarakat yang masih kurang paham tentang pengeolaan yang sudah dikelola oleh pengelola BUMDES, sama halnya perangkat desa, karena sistem manajemen BUMDES memang harus benar-benar terpisah dengan pemerintahan desa. Adapun data *Capacity Building* BUMDES selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1: Capacity Building BUMDES Tahun 2019-2021

Tahun	Capacity Building	Kinerja
2019	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen BUMDes kurang baik Membutuhkan dana untuk pengembangan BUMDes Kurang jumlah SDM
	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia 	
2020	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen BUMDes kurang baik Membutuhkan dana untuk pengembangan BUMDes Tingkat pendidikan dan kemampuan SDM kurang baik
	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia 	
2021	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen BUMDes kurang baik Membutuhkan dana untuk pengembangan BUMDes Pengalaman dan keahlian SDM belum sesuai
	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Manusia 	

Sumber: Olahan Penulis, 2022

Hal tersebut ada kaitannya dengan masalah kapasitas yang dimiliki BUMDES, permasalahan yang terjadi terkait dengan peningkatan kapasitas SDM yakni: (1) Sulit membangun motivasi Bagi Pengelola BUMDes karena berangkat dari masyarakat awam yang belum mengetahui seluk beluk potensi alam dan kesulitan dari pegawai dalam menerapkan hasil pelatihan pada pekerjaan di lapangan. (2) Terkait perkembangannya terlihat kurang peningkatan dilihat dari sarana dan prasarana yang tidak terurus, pengurus Bumdes yang kurang aktif, dan juga alokasi dana yang masih belum maksimal penggunaannya dilihat dari modal yang dipakai.

Dengan keadaan seperti itu maka masalah yang dihadapi pun semakin variatif sehingga perlu adanya *Capacity Building* BUMDes. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui sejauhmana dan bagaimana *Capacity Building* Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sigi? Berkaitan dengan *Capacity Building* Menurut Morgan (Selepole, 2018): “Capacity Building adalah kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/ sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu” hal tersebut di kuatkan oleh (D. Haryono & Nasir, 2021) bahwa *Capacity Building* harus berjalan terus menerus dan konsisten.

Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yap (Selepole, 2018) bahwa “*capacity building* adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, group, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Selain itu definisi *Capacity Building* menurut Grindel (Selepole, 2018:5) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa, “*capacity building* merupakan serangkaian strategi ditunjukkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsitas dari kinerja pemerintah, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumberdaya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan atau lingkungan”. Berdasarkan definisi *capacity building* di atas terkandung makna suatu upaya yang berhubungan dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia, upaya untuk mendorong organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan, yang dibutuhkan oleh organisasi agar dapat berfungsi dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat menjelaskan bahwa pengertian *capacity building* biasanya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat atau individu-individu dalam mengembangkan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan. Program *capacity building* (*Capacity Building*) pada dasarnya didesain untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan mereka dan menjalankan keputusan-keputusan dengan efektif. *Capacity Building* termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, reformasi peraturan dan kelembagaan, pengetahuan, teknologi dan juga asistensi finansial. Pendekatan utama yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri, dan (Rusli, D., Permadi, C. Z. ., & Haryono, D, 2022) *Capacity building* yang relevan dengan keadaan adalah yang beriringan dengan pemberdayaan pada sekeliling dan kelompok masyarakat.

Capacity Building merupakan suatu pendekatan utama yang bertujuan memperkuat kemampuan manusia agar dapat menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan prioritas hidupnya serta kemampuan mengorganisir diri untuk melakukan perubahan bagi masa depan. *Capacity Building* umumnya dipahami sebagai upaya membantu pemerintah, masyarakat ataupun individu dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Capacity Building* adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur (sumber daya manusia) untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari suatu organisasi dalam menjalankan keputusan-keputusan secara efektif melalui peningkatan pemahaman, ketrampilan dan kemampuan.

Tujuan pengembangan *Capacity Building* adalah serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsifitas dari kinerja. *Capacity Building* adalah pembelajaran, berawal dari mengalirnya kebutuhan untuk mengalami suatu hal, mengurangi ketidaktahuan dan ketidakpastian dalam hidup dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi menghadapi perubahan. Dan (Thoha, M, 2006) pengembangan kapasitas tentunya berkaitan dengan kepemimpinan dalam organisasi.

Berdasarkan pendapat kedua ahli di atas, maka tujuan dari *Capacity Building* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : (1) secara umum diidentikan pada perwujudan keberlanjutan suatu system, (2) secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik yang dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut : (a) efisiensi dalam hal waktu dan tenaga (sumber daya) yang dibutuhkan guna mencapai hasil yang diinginkan, (b) efektifitas berupa kepastian yang dilakukan demi hasil yang diinginkan, (c) responsifitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tertentu, (d) pembelajaran yang berdampak pada kinerja individu, kelompok, organisasi dan system (Selepole, 2018:8).

(Grindle, 1989) membedakan langkah-langkah *Capacity Building* atas tiga kelompok, yakni pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi dan kelembagaan. Djumadi (Selepole, 2018:10) menyatakan bahwa *Capacity Building* harus dilakukan secara efektif melalui tiga tingkatan yaitu : (1) Tingkat sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektifitas kebijakan tertentu. (2) Tingkat institusional atau keseluruhan satuan, contoh: struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, penguatan sarana dan prasana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi. (3) Tingkat individu, contohnya pengembangan keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang didalam organisasi.

Sagune (Selepole, 2018) menyatakan secara sederhana, *Capacity Building* adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tugas, menemukan solusi atas tantangan, dan menciptakan solusi untuk masalah agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan memenuhi tujuan mereka. Seperti yang dikemukakan (Selepole (2018), bahwa dimensi *Capacity Building* mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu: (1) individu, orang-orang pada organisasi maupun di luar organisasi yang terkait dengan tujuan yang akan dicapai, (2) organisasi, baik organisasi formal maupun non-formal tidak saja yang ada dalam

struktur pemerintahan tetapi juga mencakup pihak swasta dan masyarakat, (3) sistem, menyangkut seluruh proses yang terkait dengan perumusan-perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan”.

Kegiatan administrasi dan manajemen yang efektif tentu memperhatikan dan memahami perbedaan setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan memperhatikan dan memahami setiap individu, tentu akan mempermudah penempatan dan pengelompokan kerja setiap individu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sofyan Arif (Selepole, 2018) menjelaskan bahwa: “Dengan memahami pola tingkah laku individu dan motivasinya diharapkan pada manajer dapat meramalkan atau memperkirakan apa tindakan individu yang akan terjadi pada berbagai situasi sehingga sebelumnya dapat menyesuaikan kebijakannya dalam mengelola organisasi”. Dilakukannya ketiga aspek tersebut secara efektif dan berkesinambungan akan memberikan hasil yang berpengaruh kepada *good governance*, sehingga dalam *Capacity Building* tersebut akan menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang mampu dalam kapasitas teknis. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu Negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. “Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional” (Whindhu, 2018:48). Salah satu indikator majunya sebuah Negara selain infrastrukturnya yang memadai adalah kekuatan ekonomi negara tersebut.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu obyek penelitian yaitu *Capacity Building* Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Sigi dari pengalaman seseorang secara sadar, dengan melakukan interaksi melalui wawancara. selain itu juga fenomenologi merupakan gagasan realita, fakta sosial atau fenomena sosial yang terjadi seputar *Capacity Building* Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang menjadi masalah penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara, Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek atau peristiwa di masa lalu, sekarang, dan masa depan melalui pernyataan lisan. Kemudian teknik yang kedua adalah Observasi, Observasi adalah salah satu cara untuk mempelajari sesuatu atau kejadian yang dapat dilihat atau ditangkap dengan menggunakan panca indera. Terkadang, informasi yang dikumpulkan melalui observasi lebih akurat dan dapat diandalkan daripada informasi yang dikumpulkan melalui wawancara Pujaastawa, I. B. G. (2016). dan yang terakhir adalah Dokumentasi. Data selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*).

Hasil dan Pembahasan

BUMDes dibentuk atas inisiatif kepala desa dengan bantuan beberapa staf Pendirian BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa. Pengurus terdiri dari penasehat, ketua, pengawas, sekretaris, bendahara dan manajer unit usaha. Bumdesdalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga usaha desa diharapkan mampu memberikan luaran yang signifikan bagi masyarakat desa. Hasil Penelitian mengenai tujuan dibentuknya BUMDes sesuai hasil musyawarah desa ada banyak, di BUMDes dituntut untuk dapat tingkatkan itu pendapatan desa, pelayanan ke masyarakat, menggali potensi desa, menjadi desa mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan melalui wirausaha, dan juga membantu masyarakat miskin dalam hal usaha yang lebih produktif”

Program yang telah dilaksanakan oleh Bumdesmerupakan hasil dari kerja pengurus BUMDes, aparat desa dan kontribusi masyarakat setempat. Dengan adanya program yang telah dilaksanakan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Penguatan organisasi dalam *Capacity Building* BUMDES yaitu melalui pengembangan aturan main organisasi, sistem kepemimpinan, pengembangan sumber daya, dan penyediaan sarana dan prasarana kerja. Dalam aturan main organisasi dan sistem kepemimpinan, pengambilan keputusan pada proses menentukan suatu kebijakan atau program BUMDES. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa Kepala Desa dan Ketua BUMDes dalam pengembangan ekonomi masyarakat telah sesuai dengan visi yaitu “mewujudkan desa mandiri berdikari”, yang direalisasikan dalam unit usaha terdiri dari unit usaha.

Adapun pengembangan sumber daya yang dimiliki BUMDES berupa anggaran yang disediakan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pengelola BUMDES. Proses penyusunan anggaran BUMDes dilakukan dengan budgeting setiap unit usaha kemudian diusulkan dalam rapat koordinasi pengurus BUMDes yang nantinya akan disepakati bersama. Proses alokasi anggaran dilakukan dengan teliti serta kehati-hatian. Sedangkan pengembangan sarana dan prasarana untuk penyediaan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas merupakan sumber pendukung bagi BUMDES. mengenai sarana prasarana yang disediakan Bumdes Untuk prasarananya itu ada tempat aula yang bisa dipakai sebagai tempat pertemuan atau musyawarah desa". Hasil penelitian dengan masyarakat mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Desa bahwa "Desa-Desa di Kabupaten sigi yang memiliki potensi berasal dari alam.

Kondisi Sumber Daya Manusia BUMDES

Keterbatasan kapasitas SDM pengelola BUMDes di Kabupaten sigi mengakibatkan pengelolaan kurang berjalan maksimal terutama dari sisi pengembangan SDM. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukannya pengembangan potensi seperti pemberian pelatihan bagi masyarakat desa di kabupaten sigi. "Untuk *Capacity Building* sumber daya manusia, dilakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat seperti pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan berorganisasi yang bekerjasama dengan lembaga yang ada di desa misalnya Karang Taruna." Dan hasil penelitian yang lain mengemukakan bahwa:

"BUMDes melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat seperti, pelatihan kerajinan tangan, perbengkelan, aplikasi IT berbasis digital dan bimbingan-bimbingan pertanian dan peternakan"

Begitu juga menurutur salasatu kepala desa dan ketua BUMDes mengenai *Capacity Building* sumber daya manusia bahwa adanya pelatihan-pelatihan baik pelatihan cara berorganisasi maupun pelatihan keterampilan atau keahlian yan dimiliki oleh masyarakat Desa. Adapun hasil analisa peneliti bahwa pelaksana operasional BUMDes dipilih diluar dari staf desa, dimana orang-orangnya murni masyarakat Desa. Dalam penerimaan pengurus, BUMDes melakukan serangkaian komponen pemilihan sumber daya manusia adalah prosedur perekrutan, ketersediaan dan kompetensi pegawai, serta pelatihan pegawai. Kemudian setelah melalui test tertulis akan dilakukan musyawarah desa.

Pengembangan Teknologi Informasi BUMDes

BUMDes memiliki kerangka kerja dan kebijakan. Kegiatan administrasi dan manajemen yang efektif tentu memperhatikan dan memahami perbedaan setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Dengan memperhatikan dan memahami setiap individu, tentu akan mempermudah penempatan dan pengelompokan kerja setiap individu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam kerangka kapasitas, proses sistem, baik formal maupun informal, dimana organisasi berfungsi, yakni bagaimana segala sesuatu bekerja. Namun sistem dapat menjadi rumit, bahkan membingungkan, terutama dalam hubungannya dengan keputusan pengelolaan, pengetahuan dan masyarakat. Sistem ini juga salah satu penggerak lebih nyata kapasitas, dengan organisasi sudah terbiasa dengan mencari "bantuan teknis" dari pihak ketiga khususnya eksternal. Sementara itu, infrastruktur menggabarkan aset yang mendukung organisasi, baik secara fisik dan teknologi. Meskipun infrastruktur sering diambil untuk diberikan. Sebenarnya ada kemungkinan kuat untuk mencari keuntungan bukan untuk menambah nilai seperti dengan sistem.

Berdasarkan hasil penelitian melalui ketua BUMDES mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi BUMDes di Desa dengan melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan pengelolaannya secara digitalisasi untuk mendongkrak sumber pendapatan baru bagi desa". "Bentuk pemasaran secara digitalisasi yang dilakukan BUMDes ini dalam bentuk software atau aplikasi untuk mengelola konsumen, mulai dari menghimpun data konsumen, menganalisis konsumen, membangun *relationship* dengan konsumen, serta membuat konten pelayanan yang cepat, mudah dan murah dengan informasi yang lengkap, sehingga pelayanan prima secara digitalisasi dalam bidang ekonomi yang dijalankan di BUMDes.

Berdasarkan hasil peneliian tersebut bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi BUMDes di Desa dapat melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan pengelolaannya secara digitalisasi sehingga bukan mustahil bahwa hal ini akan mendongkrak sumber pendapatan baru bagi desa tersebut. Misal membangun infrastruktur pemasaran desa melalui BUMNDes merupakan salah satu strategi membangun indek ketahanan ekonomi yang menjadi salah satu indikator dalam indek desa membangun menuju desa mandiri. Bentuk pemasaran secara digitalisasi yang dilakukan BUMDes ini dalam bentuk software atau aplikasi untuk mengelola konsumen, mulai dari menghimpun data konsumen, menganalisis konsumen, membangun *relationship* dengan konsumen, serta membuat konten pelayanan yang cepat, mudah dan murah dengan informasi yang lengkap, sehingga pelayanan prima secara digitalisasi dalam bidang ekonomi yang dijalankan di BUMDes ini dapat berkembang dengan pesat dan dapat dipromosikan tanpa terbatas ruang, jarak dan waktu.

Capacity Building /Organisasi BUMDes

Kelembagaan dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu: sistem manajemen untuk meningkatkan tugas serta fungsi, dan struktur mikro. Bagian pertama (sistem manajemen) terdiri dari: sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, sistem insentif dan budaya kerja. Sementara bagian kedua (struktur mikro) terdiri dari kepemimpinan dan komunikasi. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penentu keberhasilan dalam usaha Bumdes adalah kepemimpinan dan komunikasi.

Kepemimpinan adalah entitas yang mengarahkan para anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan atau *leadership* yang baik, diyakini dapat mengharmonisasi sekaligus mendorong potensi masing-masing anggota dalam iklim kompetensi yang kondusif. Kepemimpinan dapat bekerja maksimal apabila didukung oleh sistem komunikasi yang harmonis dari pucuk pimpinan sampai pekerja level terendah. Kepemimpinan dalam organisasi BUMDes tidak serta merta diartikan sebagai ada atau tiadanya pimpinan yang kuat. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai motor yang mampu menggerakkan jiwa kewirausahaan dari setiap potensi sumber daya yang ada. Keberhasilan Bumdes dalam memilih jenis usaha dan mengembangkannya erat kaitannya dengan faktor kepemimpinan kepala desa yang didukung sepenuhnya oleh ketua BUMDes untuk menjalankan ide dan usaha.

Komunikasi yang harmonis antara kepala desa, manajer BUMDes, dan pegawai menjadi kunci lain agar BUMDes mendapat dukungan masyarakat dan menjalankan usaha secara berkelanjutan. Kepala desa sebagai komisaris dapat dengan mudah menyampaikan ide usaha dan memberikan masukan kepada BUMDes. Komunikasi yang harmonis ini juga erat dengan sistem insentif sehingga membentuk budaya kerja yang produktif. Budaya kerja yang produktif dilembagakan dengan prosedur yang standar (dalam bentuk SOP) sebagai jalan untuk menjaga keberlangsungan BUM Desa. Pelatihan keterampilan yang ditujukan bagi pengurus BUMDes merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, mampu untuk mengelola unit-unit usaha BUMDes secara inovatif dan teknik lainnya agar dapat menghasilkan keuntungan baik secara finansial maupun sosial bagi masyarakat desa tersebut.

Pengurus maupun pengelola BUMDes di kabupaten sigi ini dituntut mampu memiliki keterampilan manajemen serta mampu menyajikan penyusunan pelaporan keuangan secara profesional dan akuntabel. Selaku pengurus BUMDes harus dapat berinovasi dan proaktif menelusuri hal yang baru untuk dikembangkan sebagai unit usaha yang produktif dengan tidak terbatas pada bidang-bidang usaha tertentu saja sehingga menghasilkan keuntungan sesuai target bahkan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Bahkan pelaporan keuangan BUMDes kedepannya itu dapat dilakukan melalui salah satu aplikasi BUMDes yang dapat dimanfaatkan oleh para pengelola BUMDes. Pada era digital seperti sekarang ini aplikasi BUMDes ini kiranya dapat memudahkan para pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha lainnya.

Struktur organisasi BUMDes, terdiri dari unit-unit kerja dengan berbagai uraian pekerjaannya sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan antara unit yang satu dengan unit yang lain. Dengan adanya struktur organisasi BUMDes, para pengurus yang terlibat dalam pelaksanaan operasionalisasi BUMDes dapat mengetahui apa saja tugas dan tanggung jawabnya serta garis perintah dalam struktur kepengurusan BUMDes. Untuk tugas dan tanggung jawab pengelolaan BUMDes telah dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga (ADART), dimana organisasi pengelola BUMDes terpisah dari pemerintah desa. Dalam etika dan etos kerja pengurus BUMDes telah mampu mewujudkan regulasi dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi pedoman pengelolaan BUMDes sehingga semua aturan main diatur dalam tata kelola BUMDes yang dijabarkan secara detail dalam AD-ART. Dengan demikian BUMDes, telah memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan BUMDes itu sendiri.

Dengan demikian, struktur organisasi pada dasarnya merupakan peran-peran kerja dan mekanisme administrasi untuk pengawasan, serta penyatuan aktivitas pekerjaan termasuk lintas batas aktivitas pekerjaan organisasi. Dengan demikian struktur organisasi berfungsi sebagai suatu konsep pembagian tugas dan tanggung jawab untuk setiap jenis dan sifat pekerjaan yang dalam dimensi struktural saling berkaitan satu sama lain. Struktur organisasi merupakan alat pengendalian organisasional yang menunjukkan tingkat pendelegasian wewenang manajemen puncak dalam pembuatan keputusan kepada tingkat middle ataupun lower dalam manajemen. Struktur organisasi dicirikan dengan adanya distribusi kewenangan untuk masing-masing unit organisasi, pembagian kerja yang jelas, mekanisme kontrol, kolaborasi, koordinasi tugas. Untuk menentukan struktur organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi dilakukan pengorganisasian (D. Haryono & Marlina, 2021). Pengorganisasian merupakan langkah-langkah untuk menentukan komponen-komponen aktivitas yang diperlukan, kemudian membagi pekerjaan kepada kelompok pelaksana dan mendelegasikan wewenang kepada kelompok pelaksana tersebut.

Capacity Building Sumber Daya Manusia BUMDes

Unsur-unsur pada tingkat individu yang menonjol sebagai faktor kunci sukses BUMDes adalah pola rekrutmen, keterampilan, motivasi, dan *training*. Unsur tersebut juga menentukan tingkat perkembangan dan keberlanjutan BUMDes. Pola rekrutmen yang terbuka disertai seleksi terutama aspek motivasi kerja menjadi salah satu tiang kokohnya BUMDes. Rekrutmen terbuka juga membuat BUMDes mempunyai nilai positif di hadapan masyarakat desa yakni meningkatkan kepercayaan bahwa BUMDes tidak hanya menjadi milik elit desa. Persepsi positif ini merupakan modal sosial agar program BUMDes didukung oleh masyarakat.

Sumber daya terutama sumber daya aparatur yang berperan melaksanakan kebijakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses implementasi kebijakan, karena aparatur itulah yang mengkomunikasikan dan segala aturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan dengan implementasi kebijakan. Karena itu penyediaan sumber daya yang meliputi sumber daya staf, fasilitas dan dukungan anggaran dalam proses implementasi kebijakan perlu dikritisi secara cermat (Rusli, D., Sanusi, A., Sanusi, A., Haryono, D., & Andriani, D, 2021). Begitu pentingnya sumber daya manusia dalam mengoptimalkan fungsi BUMDes di Kabupaten Sigi ini harus ada strategi dan langkah kongkrit yang harus dilakukan untuk lebih memberdayakan setiap karyawan yang ada. Intinya penerimaan dan penempatan karyawan bukan asal menerima apalagi hanya mengandalkan faktor kekerabatan saja.

Sumber daya yang ada di Kabupaten Sigi ini selama ini dapat dikatakan telah memadai dan dapat berjalan dengan baik walaupun belum mencapai target yang diharapkan. Memang masih rendah akan tetapi saat ini tidak menjadi masalah asalkan tidak merugi. Pengurus BUMDes yang ada belum mampu mengelola aset secara maksimal agar dapat memperoleh keuntungan di atas target yang ditetapkan. Pemberdayaan sumber daya manusia sejatinya merupakan proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan manusia melalui perubahan dan pengembangan melalui peningkatan kemampuan selalu inovatif dan kreatif, pengetahuan, keterampilan dan penggunaan teknologi digitalisasi agar dapat mengikuti perkembangan jaman. Dalam jangka waktu yang panjang, apabila ada pengembangan SDM BUMDes ini dilakukan dengan terjadwal maka bukan hal mustahil sumber daya manusia yang ada tersebut akan banyak memberikan ide, gagasan, inisiatif, perubahan-perubahan ke arah yang lebih maju dan dapat mengatasi serta mengantisipasi berbagai hal.

Pengisian SDM BUMDes merupakan salah satu Proses seleksi pengurus diumumkan secara terbuka melalui website resmi dan disebarluaskan melalui pengumuman desa. Sistem ini membuka peluang transparansi dalam pemilihan pengurus untuk mendapatkan yang memiliki kompetensi. Untuk itu sudah seharusnya dalam melakukan perekrutan SDM pengelola BUMDes di Kabupaten Sigi ini melalui seleksi yang ketat. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh tenaga kerja yang handal, memiliki keahlian, profesional di bidangnya. Walaupun tidak profesional minimal ada muatan nilai-nilai dasar tertentu yang harus dipenuhi untuk setiap pelamar sehingga dengan kemampuan dasar yang dimilikinya tersebut akan mudah untuk diikutsertakan dalam berbagai diklat, workshop dan lain-lain sehingga pada akhirnya menjadi pegawai yang profesional di bidangnya.

Selain pola rekrutmen, keterampilan dalam mengelola BUMDes juga sangat menentukan perkembangan BUMDes. Keterampilan dalam pengelolaan manajemen BUMDes diartikan sebagai konsep-konsep yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, memetakan sumber daya, sekaligus mengelolanya menjadi usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi kesejahteraan bersama secara berkesinambungan. Keterampilan dalam aspek teknis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat konsep rencana pengembangan BUMDes secara sistematis dan berkesinambungan. Keterampilan juga berkaitan dengan motivasi kerja pengelola untuk peningkatan produktivitas. Motivasi kerja ini bahkan mutlak bagi pengelolaan dan pengembangan unit-unit rintisan BUMDes. Sebuah rintisan usaha yang belum mapan akan mempunyai banyak tantangan sehingga memerlukan pengelola dengan motivasi kerja yang lebih tinggi. Bila motivasi dapat dikelola dengan baik maka produktivitas pun akan meningkat baik individu maupun kelompok

Capacity Building Sistem BUMDes

Pada penelitian ini sistem didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan main dalam BUMDes. Pembatasan yang dilakukan melalui sejumlah aturan tersebut ditujukan untuk mengendalikan perilaku masing-masing sumber daya guna mencapai tujuan bersama. Sistem yang dianggap paling dominan pada pengembangan BUMDes adalah Peraturan Desa tentang BUMDes, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes.

Unsur Peraturan Desa tentang BUMDes sangat besar pengaruhnya dalam setiap perkembangan BUMDes. Perdes memuat semua hal yang mengatur tentang kehidupan organisasi BUMDes, mulai dari tata cara pendirian, pengurusan, pengelolaan hingga pembubaran BUMDes Rumusan sistem yang tertuang dalam bentuk Perdes tersebut merupakan hasil diskusi secara partisipatif oleh seluruh komponen masyarakat desa

dengan menghadirkan Tim Pembentukan BUMDes, anggota BPD serta pemuka masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam forum Musyawarah Desa (MUSDES). Pertemuan tersebut menghasilkan desain struktur organisasi pengurus BUMDes, penyertaan modal desa, jenis usaha, susunan pengurus, pembagian hasil usaha, dan pembubaran BUMDes, bahkan jika diperlukan bentuk badan hukum. Untuk lebih memperjelas tugas seluruh pengurus BUMDes, masyarakat dan para pihak yang berkepentingan menyusun Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes.

AD/ART menjadi rujukan pengelola dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Hal-hal yang diatur dalam AD/ART ini antara lain meliputi nama, kedudukan, dan wilayah; maksud dan tujuan pendirian BUMDes; bentuk badan hukum; sumber permodalan; unit-unit usaha; organisasi; pengawasan; dan pertanggungjawaban BUMDes. Dengan adanya kejelasan kewenangan dan tugas para pihak yang terkait ini diharapkan masing-masing dapat menjalankan amanah demi kemajuan desa. Kepastian sistem pada tingkat desa atas keberlanjutan ekonomi kerakyatan melalui BUMDes juga mendapatkan dukungan secara nasional. Pemerintah melalui Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa memastikan komitmen dan keberpihakannya kepada BUMDes sebagai pelaku ekonomi desa yang diperhitungkan.

BUMDes di Kabupaten Sigi yang dibentuk pada tahun 2015 dan didukung melalui Peraturan Kabupaten Sigi Perdes dan AD/ART, perkembangannya bermula dari usaha pertama berupa unit Usaha, dalam waktu kurang dari empat tahun sudah berkembang menjadi 3 unit usaha yang menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Ketiadaan sistem ini dapat berdampak pada keberlangsungan usaha yang berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Capacity Building* Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Sigi yaitu pengambilan Keputusan program BUMDES Kabupaten Sigi yang dilakukan secara musyawarah, nilai yang dimiliki BUMDES Kabupaten Sigi berupa anggaran yang disediakan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pengurus BUMDES, dan penyediaan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas. Untuk *Capacity Building* Individu/Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sigi pengembangan kemampuan yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengajaran, dan pembelajaran secara luas kepada pengurus BUMDES, baik secara formal, maupun secara informal seperti kursus, pelatihan, magang, sosialisasi, dan lain-lain, kemudian potensi yang dimiliki pengurus BUMDES yang kemudian diaplikasikan ke dalam tugas yang dibebankannya sebagai pengelola sistem informasi BUMDES, dan bidang pekerjaan yang dibebankan kepada Pengurus BUMDES sesuai dengan keahlian yang mereka miliki. Terakhir *Capacity Building* Sistem di Kabupaten Sigi dasar acuan atau Standard Operating Procedure (SOP) yang dijadikan sebagai pedoman kerja bagi BUMDES Kabupaten Sigi melalui mengelola sistem informasi BUMDES dan program-program yang dibuat BUMDES Kabupaten Sigi sebagai pengelola sistem informasi BUMDES yang bertujuan untuk membangun serta memberdayakan masyarakat desa.

Referensi

- Haryanto. 2004. *Capacity Building Kelembagaan*. Jakarta: Penerbit AP21 Pres.
- Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Pendidikan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maryunani, 2008. *Pembangunan BUMDES dan Pemerdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sjafrizal, 2014. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta; Rajawali Pers..
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Thoha, M. 2006. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Andi Adnan, 2021. *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Pitumpidange Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Makassar.
- Dandan Haryono, & Nurlatipah Nasir. (2021). Pengembangan kapasitas kelembagaan komisi penanggulangan aids daerah (kpad) dalam pencegahan dan penanggulangan hiv/aids di kota tasikmalaya. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 464-482. Diambil dari <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2481>
- Horton, D. 2003. *Evaluating Capacity Development: Experiences from Research and Development Organizations around the World*. Belanda: ISNAR (International Service for National Agriculture Research). <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119> (diakses pada tanggal 21 Oktober 2021)

-
- Haryono, D., & Marlina, L. (2021). Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Stunting Di Desa Singaparna Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya. *The Indonesian Journal Of Politics And Policy (IJPP)*, 3(2), 42-52.
- Makelon Selepole, 2018. Capacity Building Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Sistem Informasi Desa Di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo. Skripsi: Progran Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Rusli, D., Sanusi, A. ., Sanusi, A. ., Haryono, D. ., & Andriani, D. . (2021). Efektivitas Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Wilayah Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* , 2 (10), 1735–1757. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i10.246>
- Rusli, D., Permadi, C. Z. ., & Haryono, D. . (2022). Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kelurahan Kahuripan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3 Haryono, D., & Marlina, L. (2021) (4), 515–528. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i4.565>
- Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDES ..
- Peraturan Desa Cilampunghilir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Desa dan PDT Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 ttg Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.